



Analisis Kemiskinan Provinsi di Indonesia (Studi Kasus: Sebelum Pandemic Covid 19 dan Saat Pandemic Covid 19)

*Analysis of Provincial Poverty in Indonesia
(Case Study: Before the Covid 19 Pandemic and
During the Covid 19 Pandemic)*

Sri Nathasya Br Sitepu¹⁾

Program Studi Manajemen, Fakultas School Of Business and Management
Universitas Ciputra Surabaya¹⁾

email: nathasya.sitepu@ciputra.ac.id

Disubmit: 8 Agustus 2022; Direvisi; 30 Agustus; Dipublish; 2 Oktober 2022

Abstract

Poverty uses three measurements, namely: the percentage of poor people (P0), the depth index (P1) and the severity index (P2). Poverty in 2018-2019 has decreased where the Covid 19 Pandemic has not yet occurred in Indonesia. After the Covid-19 Pandemic (2020-2021) there was a restriction on population mobility, thereby reducing income and having an impact on poverty. The object of research uses all provinces in Indonesia. Poverty data is sourced from the Central Statistics Agency and the Covid 19 Task Force. The purpose of the study is to compare poverty and the COVID-19 pandemic in every province in Indonesia. This study uses descriptive statistical analysis using data from 2019 and 2020. The results found five provinces with a high rate of COVID-19 cases including: West Java, Central Java, East Java, North Sumatra, and DI. Yogyakarta. The five provinces with the highest COVID-19 cases experienced an increase in poverty during the 2020 COVID-19 pandemic.

Keywords: Percentage of Poor Population (P0); Depth Index (P1); Poverty Severity Index (P2); Covid 19; Poverty

Abstrak

Kemiskinan menggunakan tiga pengukuran yaitu: persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan (P2). Kemiskinan tahun 2018-2019 mengalami penurunan dimana Pandemic Covid 19 belum terjadi di Indonesia. Pasca Pandemic Covid 19 (tahun 2020-2021) terjadi pembatasan mobilitas penduduk sehingga menurunkan pendapatan dan berdampak pada kemiskinan. Objek penelitian menggunakan seluruh Provinsi di Indonesia. Data kemiskinan bersumber dari badan pusat statistik dan satuan tugas penanganan Covid 19. Tujuan penelitian membandingkan kemiskinan dan pandemic covid 19 pada setiap Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif menggunakan data tahun 2019 dan 2020. Hasil penelitian menemukan lima Provinsi dengan tingkat kasus covid 19 tinggi diantaranya: Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan DI. Yogyakarta. Kelima provinsi dengan kasus covid 19 tertinggi mengalami peningkatan kemiskinan saat pandemic covid 19 tahun 2020.

Kata Kunci: Persentase Penduduk Miskin (P0); Indeks Kedalaman (P1); Indeks Keparahan Kemiskinan (P2); Covid 19; Kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi kegagalan untuk menyediakan kebutuhan dasar agar dapat bertahan hidup (Sachs, 2015). Kemiskinan terjadi dikarenakan adanya bahan makan yang tidak sesuai dengan kuantitas serta kualitas yang dibutuhkan penduduk, minimnya ketersediaan terhadap akses infrastruktur dasar seperti: akses listrik, akses air minum layak dan akses pemukiman yang sesuai dengan kebutuhan dasar. Ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar berakibat pada rendahnya daya saing penduduk di pasar tenaga kerja. Kompetensi yang rendah pada pasar tenaga kerja berdampak terhadap perolehan upah penduduk yang berada dibawah upah minimum. Pada konteks yang lebih luas memiliki hubungan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin (Sanz et al., 2017; Alkire dan Santos, 2014). Kemiskinan merupakan kondisi ketimpangan yang disebabkan kondisi ketidakadilan yang dialami oleh penduduk (Itang, 2017).

Kemiskinan Indonesia berada pada kondisi kronis yang disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi (Purwono et al., 2021). Kemiskinan diukur menggunakan beberapa cara diantaranya: 1) persentase tingkat kemiskinan (P0), indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Tingkat kemiskinan (P0) merupakan proporsi penduduk miskin yang tinggal pada satu wilayah. Nilai indeks kedalaman (P1) merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (BPS, 2018). Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin (Ferezagia, 2018). Hasil pengukuran kemiskinan dari masing-masing Provinsi di Indonesia berbeda-beda berdasarkan cara pengukuran menggunakan dari indeks kedalaman, indeks keparahan dan gini ratio (Rini & Sugiharti, 2017). Data tingkat kemiskinan (P0), indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Indonesia mengalami perubahan. Tabel 1 adalah data (P0) (P1) dan (P2) di Indonesia pada tahun 2014-2018.

Tabel 1. Data Kemiskinan (P0, P1 dan (P2) Di Indonesia
(Satuan Persentase) Tahun 2014-2018

Tahun	P ₀	P1	P2
2014	8,16	1,25	0,31
2015	11,13	1,29	0,35
2016	10,70	1,21	0,29
2017	10,12	1,24	0,30
2018	9,66	1,08	0,25

Sumber: BPS, 2018

Nilai persentase tingkat kemiskinan (P0) di Indonesia pada tahun 2014-2018 berfluktuasi. Tingkat kemiskinan (P0) tahun 2015 mengalami peningkatan namun terjadi penurunan sepanjang tahun 2016 -2018. Nilai indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) berfluktuasi tahun 2015 dan tahun 2017 meningkat sementara tahun lainnya menurun. Fluktuasi kemiskinan (P0, P1 dan P2) disebabkan inflasi, upah serta harga komoditas pada tahun yang berbeda (Badan Pusat Statistik, 2015 dan Badan Pusat Statistik, 2017).

Kemiskinan (P0, P1, P2) pada tahun 2015 meningkat dikarenakan: 1) peningkatan inflasi perkotaan 4,03 persen dan inflasi pedesaan 4,40 persen selama periode September 2014 – Maret 2015, 2) penurunan upah buruh tani per hari sebesar 1,34 persen (Rp.39.045 menjadi Rp. 38.522),

3) harga pokok dari barang *non* makanan dan makanan yang meningkat. Daftar makanan yang harganya meningkat: beras, rokok, cabe rawit, telur ayam, roti, daging, tahu dan tempe. Daftar barang *non* makanan yang harganya meningkat diantaranya: bahan bakar (bensin), listrik, biaya pendidikan dan perlengkapan mandi. Khusus daerah perkotaan kemiskinan dipengaruhi peningkatan biaya transportasi (Badan Pusat Statistik, 2015). Peningkatan nilai indeks kemiskinan (P1 dan P2) di tahun 2017 disebabkan oleh: 1) peningkatan inflasi 3,61persen, 2) peningkatan upah *rill* buruh tani 0,16 persen, 3) penurunan upah *rill* buruh bangunan menurun sebesar 0,72 persen, 4) harga komoditas pangan menurun, 5) terhambatnya pembagian beras sejahtera bagi penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2017).

Perubahan kemiskinan tahun 2015-2018 sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi inflasi, upah dan kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi bahan bakar. Kondisi ekonomi juga mengalami perubahan ketika muncul kasus kesehatan khususnya kemunculan penyakit virus corona (Covid 19) di Indonesia. Kemunculan virus corona (Covid 19) pertama kali di Wuhan China pada Desember 2019. Penularan virus corona (Covid 19) dilaporkan masuk pada Maret 2020 sebagai kasus pertama (Alam, 2021). Virus corona (Covid 19) merupakan mutasi virus hewan kelelawar yang menjangkit kepada manusia (Yip Britt dan Valeria Perasso, 2021). Virus corona (Covid 19) memberikan dampak kesehatan berupa gangguan pernafasan hingga berakibat pada kematian. Virus corona (Covid 19) memiliki penularan yang tinggi sehingga ditetapkan menjadi pandemic. Pandemic covid 19 belum memiliki vaksin ataupun obat untuk mengatasi virus corona (Covid 19) hingga tahun 2020 saat terindikasi di Indonesia.

Kasus penyebaran virus corona (Covid 19) pertama kali di Indonesia pada Maret 2020. Virus corona (Covid 19) diumumkan pemerintah menjadi pandemic Covid 19 karena menyebar pada seluruh di Indonesia tahun 2020. Tabel 2 merupakan data penduduk seluruh Indonesia yang terpapar, berhasil sembuh hingga penduduk yang meninggal dunia akibat virus corona (Covid 19) dari tahun 2020 hingga agustus tahun 2022.

Tabel 2. Situasi Covid 19 di Indonesia Tahun 2022 (Satuan Jiwa)

Data	Kasus penduduk Positif Covid 19	Penduduk Sembuh dari Covid 19	Penduduk Meninggal dunia akibat Covid 19
Indonesia	6.216.621	6.010.545	157.03

Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid 19 (2022).

Tabel 2 menunjukkan jumlah penduduk yang berhasil sembuh dari infeksi virus corona (Covid 19) sebesar 96,68 persen. Penduduk yang terkena virus Covid 19 tidak dapat beraktifitas sehingga mengurangi kegiatan produksi. Mobilitas penduduk melambat dan mempengaruhi kondisi ekonomi penduduk.

Penyebaran virus corona (Covid 19) di Indonesia memberikan dampak terhadap ekonomi (Rahmawati et al., 2021). Peningkatan 1 orang penduduk yang terkena virus corona (Covid 19) akan menambah jumlah kemiskinan sebesar 0,0087 jiwa dimana faktor lainnya diasumsikan tetap (Setyadi & Indriyani, 2021). Hal ini dikarenakan adanya pembatasan mobilitas mempengaruhi kegiatan produksi, aktifitas bisnis, dan juga pola konsumsi dari penduduk. Virus corona (Covid 19) juga memberikan dampak ekonomi berupa munculnya pengangguran sebagai akibat

pembatasan mobilitas dan pengurangan kegiatan produksi. Hal ini menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi (Suryahadi et al., 2020).

Tujuan dari penelitian ini akan melakukan analisis kemiskinan dan membandingkan dengan kondisi pandemic covid 19 di Indonesia. Kemiskinan diukur dengan beberapa cara diantaranya: persentase tingkat kemiskinan (P0), indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) berdasarkan Provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini memberikan informasi kondisi kemiskinan dan pandemic covid 19 yang paling berat (parah) di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian menganalisis data tingkat kemiskinan (P0), indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Penelitian ini menggunakan data tahun 2019 dan data kemiskinan tahun 2020. Proses analisis data kemiskinan dilakukan dengan cara membandingkan data kemiskinan sebelum terjadi pandemic corona virus (Covid 19) pada tahun 2019 dengan data kemiskinan setelah Indonesia mengalami pandemic corona virus (Covid 19) tahun 2020. Ruang lingkup penelitian mencakup seluruh Provinsi di Indonesia. Data penelitian bersumber dari data kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statisti (BPS).

Penelitian ini akan menganalisis kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar dengan tiga indikator kemiskinan diantaranya:

1. Persentase penduduk miskin (P0)

Ukuran ini menjelaskan proporsi tingkat kemiskinan pada satu wilayah. Ukuran kemiskinan ini menunjukkan *Head Count Index* (HCI-P₀). Nilai tingkat kemiskinan yang tinggi berarti tingkat kemiskinan pada suatu daerah tinggi. Perolehan nilai tingkat kemiskinan rendah artinya proporsi penduduk miskin pada suatu wilayah lebih kecil (Aisah et al., 2020).

2. Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

Pengukuran ini menganalisis jarak antara jurang pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan menggunakan *Poverty Gap Index* (Indeks kedalaman kemiskinan P1) adalah ukuran kesenjangan rata-rata pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan yang tinggi memberikan arti rata-rata nilai pengeluaran yang jauh dibandingkan garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan P1 rendah memberikan gambaran jarak kecil antara rata-rata pengeluaran dengan garis kemiskinan (Aisah et al., 2020).

3. Indeks keparahan kemiskinan (P2)

Pengukuran memperlihatkan keparahan kemiskinan melalui nilai bobot yang tinggi bagi *poverty gap* terhadap penduduk miskin sedangkan bobot rendah merupakan kondisi penduduk tidak terlalu miskin. *Poverty Severity Indeks* (indeks keparahan kemiskinan P2) merupakan gambaran sebaran pengeluaran pada penduduk miskin (Aisah et al., 2020).

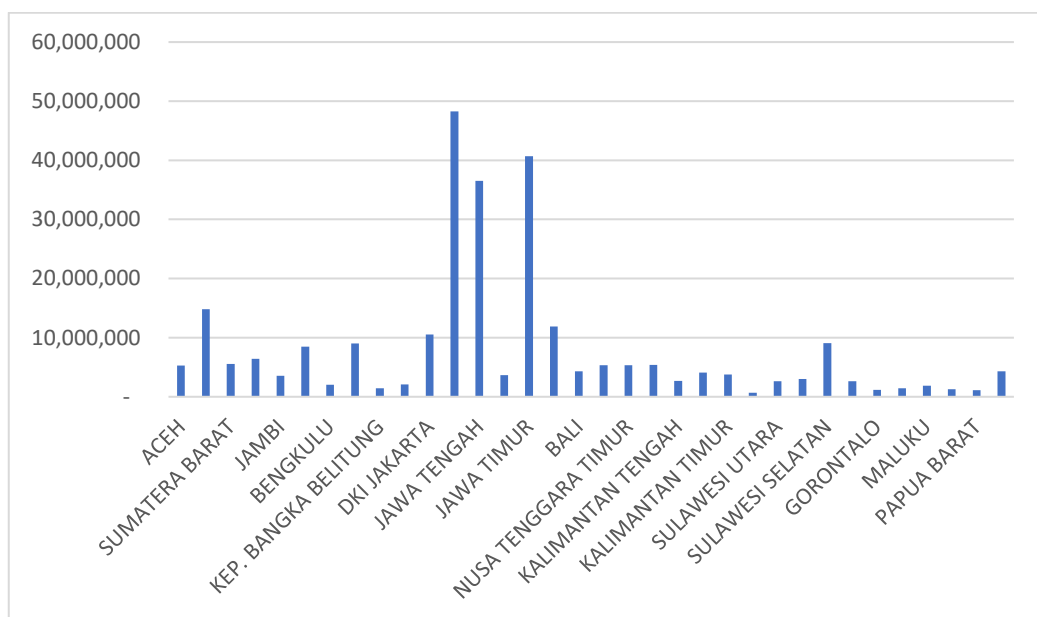
Teknik analisis penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif. Gujarati & Porter, (2012) menjelaskan analisis statistik deskriptif sebagai rangkaian kegiatan menghimpun, meringkas dan menyajikan data sehingga data memiliki makna dan mudah dibaca. Statistik deskriptif menghasilkan deskripsi yang berhubungan dengan objek penelitian. Statistik deskriptif pada penelitian ini akan menjelaskan data kemiskinan dengan karakteristik kemiskinan menggunakan indikator: tingkat kemiskinan (P0), indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan

kemiskinan (P2). Indikator kemiskinan dijelaskan dengan data tahun 2019 (sebelum terjadi pandemic Covid 19) dan data tahun 2020 (ketika Indonesia mengalami pandemic Covid 19).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Jumlah Penduduk, Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis

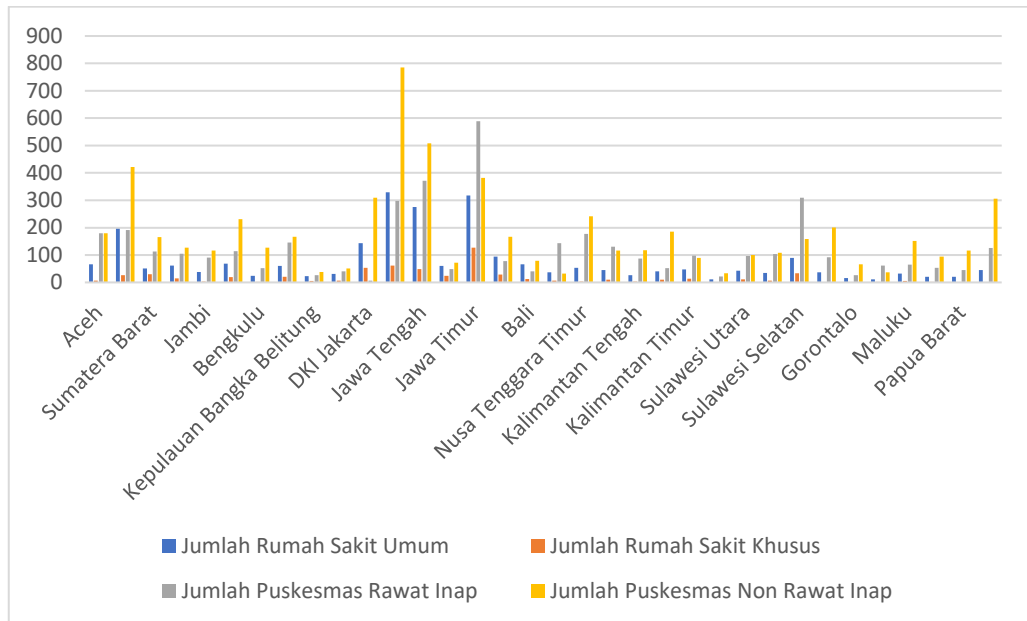
Jumlah penduduk pada masing-masing Provinsi di Indonesia berbeda. Lima Provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi diantaranya: Provinsi Jawa Barat sebesar 48.274.162 orang, Provinsi Jawa Timur sejumlah 40.665.696 orang, Provinsi Jawa Tengah dengan 36.516.035 orang, Provinsi Sumatra Utara terdapat 14.799.361 orang dan Provinsi Banten sebanyak 11.904.562 orang. Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Terdapat tiga Provinsi dengan penduduk terpadat dan jika dijumlahkan total penduduk di Pulau Jawa 151.591.262 orang (Badan Pusat Statistik, 2020). Perbedaan jumlah penduduk dari masing-masing Provinsi di Indonesia pada gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Satuan Jiwa)

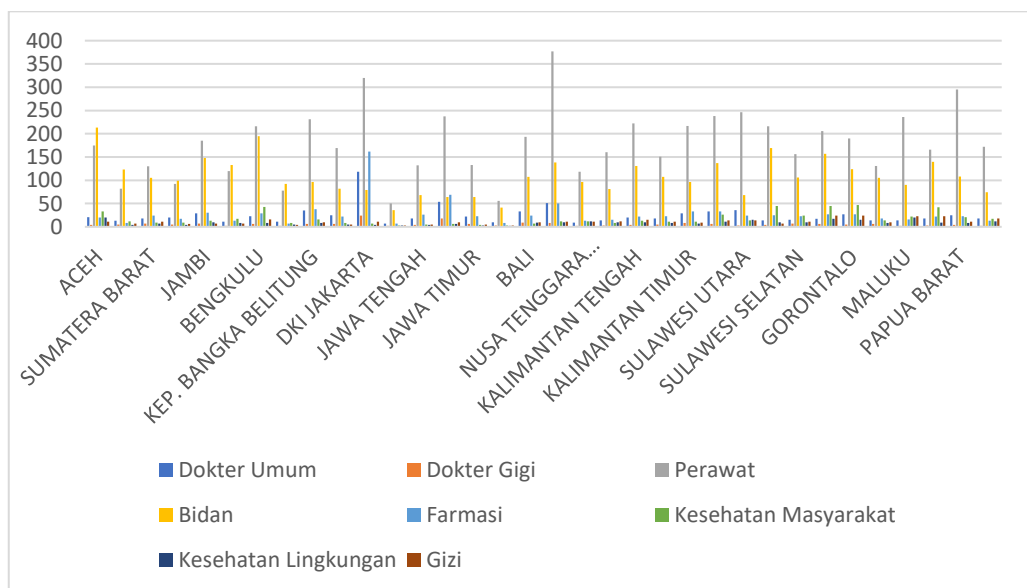
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Penduduk membutuhkan layanan kesehatan ketika penduduk sakit. Jenis-jenis layanan kesehatan di Indonesia terdiri dari: rumah sakit umum, puskesmas rawat inap, rumah sakit khusus, puskesmas *non* rawat inap. Ketersediaan puskesmas *non* rawat inap berada pada urutan pertama di Indonesia, Peringkat kedua disusul oleh puskesmas rawat inap sebanyak 4.177 unit. Jumlah penduduk yang padat sejalan dengan ketersediaan layanan kesehatan. Provinsi dengan jumlah penduduk besar memiliki fasilitas kesehatan yang lebih banyak. Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi dengan penduduk terbanyak sekaligus Provinsi dengan jumlah layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Terdapat 329 Rumah Sakit Umum (RSU), 62 Rumah Sakit Khusus (RSK), 298 puskesmas rawat inap dan 785 puskesmas *non* rawat inap di Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2018). Penduduk dengan jumlah besar membutuhkan layanan kesehatan yang lebih tinggi. Layanan kesehatan di Pulau Jawa jumlahnya paling besar dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Data jumlah layanan kesehatan pada masing-masing Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Layanan Kesehatan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Satuan Unit)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Jumlah layanan kesehatan didukung oleh ketersediaan tenaga medis yang terdiri dari: dokter umum, bidan, kesehatan lingkungan, dokter gigi, farmasi, ahli gizi, perawat dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, (2020) jumlah perawat 6096 orang, bidan 3672 orang, farmasi 934 orang, dokter umum 840 orang, kesehatan masyarakat 587 orang, ahli gizi 379 orang, kesehatan lingkungan 302 orang dan dokter gigi 194 orang diseluruh layanan kesehatan di Indonesia. Tenaga medis di Pulau Jawa lebih banyak dengan jumlah dokter umum 299 orang, dokter gigi 57 orang, perawat 928 orang, bidan 352 orang, farmasi 295 orang, kesehatan masyarakat 28 orang, kesehatan lingkungan 22 orang dan gizi 37 orang (Badan Pusat Statistik, 2020). Persebaran tenaga medis berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2018 pada gambar 3.



Gambar 2. Jumlah Tenaga Medis Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Satuan orang)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

3.2 Persentase Penduduk Miskin (PO)

Data PO tahun 2019 adalah data sebelum pandemic covid 19. Data PO tahun 2019 memiliki nilai terendah 3,42 persen dari DKI Jakarta. Provinsi Nilai PO Papua 26,55 persen merupakan nilai tertinggi. Pandemic covid 19 menggeser persentase penduduk miskin terendah dari Provinsi DKI Jakarta (3,42 persen) berganti menjadi Provinsi Bali (4,45 persen). Tahun 2020 Provinsi Papua memiliki nilai PO tertinggi (26,8 persen).

Nilai PO dikelompokkan menjadi 3 diantaranya: rendah, sedang dan berat. PO kategori rendah dengan nilai 0-10 persen terdiri dari 18 Provinsi. PO kelompok sedang 10,01–20 persen dengan 13 Provinsi. Kelompok berat dengan persentase penduduk miskin 20,01–30 persen. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua merupakan Provinsi dalam kategori kemiskinan berat. Perkembangan PO digambarkan pada tabel 3.

Tabel 3 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019-2020

Nama Provinsi	(PO) Ringan (0-10) %		(PO) Sedang (10,01-20)%		(PO) Berat (20,01-30)%	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	ACEH			15.01	15.43	
SUMATERA UTARA	8.63	9.14				
SUMATERA BARAT	6.29	6.56				
RIAU	6.9	7.04				
JAMBI	7.51	7.97				
SUMATERA SELATAN			12.56	12.98		
BENGGKULU			14.91	15.3		
LAMPUNG			12.3	12.76		
KEP. BANGKA BELITUNG	4.5	4.89				
KEP. RIAU	5.8	6.13				
DKI JAKARTA	3.42	4.69				
JAWA BARAT	6.82	8.43				
JAWA TENGAH			10.58	11.84		
DI YOGYAKARTA			11.44	12.8		
JAWA TIMUR			10.2	11.46		
BANTEN	4.94	6.63				
BALI	3.61	4.45				
NUSA TENGGARA BARAT			13.88	14.23		
NUSA TENGGARA TIMUR					20.62	21.21
KALIMANTAN BARAT	7.28	7.24				
KALIMANTAN TENGAH	4.81	5.26				
KALIMANTAN SELATAN	4.47	4.83				
KALIMANTAN TIMUR	5.91	6.64				
KALIMANTAN UTARA	6.49	7.41				
SULAWESI UTARA	7.51	7.78				
SULAWESI TENGAH			13.18	13.06		
SULAWESI SELATAN	8.56	8.99				
SULAWESI TENGGARA			11.04	11.69		
GORONTALO			15.31	15.59		
SULAWESI BARAT			10.95	11.5		
MALUKU			17.65	17.99		
MALUKU UTARA	6.91	6.97				
PAPUA BARAT					21.51	21.7
PAPUA					26.55	26.8

Sumber: BPS, 2020.

Pandemic Covid 19 berpengaruh meningkatkan nilai PO pada seluruh Provinsi di Indonesia. Peningkatan nilai PO yang melebihi satu persen berada pada beberapa Provinsi diantaranya: Jawa Barat, Banten, Jawa tengah, DI. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Provinsi di Pulau Jawa sebagian besar berada pada kelompok PO sedang. Hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk mengalami penurunan pendapatan diakibatkan adanya pembatasan mobilitas saat terjadi Pandemic Covid 19. Provinsi lainnya di Indonesia mengalami peningkatan PO kurang dari satu persen. Kondisi ini disebabkan oleh pandemic Covid 19. Dampak pandemic Covid 19 adalah meningkatkan persentase penduduk miskin (Goma, 2021).

3.2. Indeks Kedalaman (P1)

Pengukuran kemiskinan menggunakan indeks kedalaman (P1) pada tahun 2019 hingga 2020 menghasilkan perubahan nilai. Indeks P1 tahun 2019 memiliki nilai tertinggi 6,07 persen dari Provinsi Papua dan nilai terendah 0,4 persen dari DKI Jakarta. Pengelompokan P1 dilakukan dengan cara membagi kedalam 3 kategori diantaranya: kelompok ringan (nilai P1 berkisar 0-2 persen), kelompok sedang (memiliki nilai diantara 2,01-4 persen) dan kelompok berat (nilai berada pada 4,01-6 persen). Kelompok P1 yang masuk pada kategori ringan terdiri dari 23 Provinsi. Ditemukan delapan Provinsi pada kategori P1 sedang. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua menjadi Provinsi yang masuk dalam kategori kelompok P1 berat.

Nilai P1 tahun 2020 berubah ketika terjadi pandemic Covid 19 di Indonesia. Perubahan P1 cenderung kearah peningkatan. Provinsi Bali memiliki nilai P1 terkecil (0,61 persen) dan Provinsi Papua memperoleh nilai terbesar 6,9 persen tahun 2020. Provinsi dengan nilai P1 ringan (0-2 persen) ditemukan pada 22 Provinsi. Provinsi yang termasuk dalam kelompok P1 kategori ringan yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Nilai P1 dengan kategori sedang terdiri dari 9 Provinsi diantaranya: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Provinsi Maluku. Kelompok P1 yang termasuk dalam kategori berat muncul pada 3 Provinsi diantaranya: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.

Provinsi Lampung dan Provinsi DI. Yogyakarta mengalami peningkatan pada nilai P1 tahun 2019 hingga tahun 2020. Nilai P1 mengalami pergeseran dari kelompok nilai P1 kelompok rendah menjadi kelompok dengan nilai P1 kategori sedang. Peningkatan nilai indeks kedalaman Provinsi Lampung 0,12 persen sementara Provinsi DI. Yogyakarta memiliki peningkatan nilai sebesar 0,54 persen. Kondisi Pandemic Covid 19 juga memberikan dampak yang kurang baik terhadap indeks kedalaman yang dapat dilihat dari peningkatan nilai P1 dari masing-Masing Provinsi di Indonesia. Perubahan nilai P1 dari masing-masing Provinsi di Indonesia tahun 2019-2020 terdapat pada tabel 4.

Tabel 4. Data Indeks Kedalaman (P1) Indonesia Tahun 2019-2020

Nama Provinsi	(P1) Ringan (0-2) Persen		(P1) Sedang (2,01-4) Persen		(P1) Berat (4,01-6) Persen	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	ACEH			2.58	2.85	
SUMATERA UTARA	1.48	1.6				
SUMATERA BARAT	0.78	0.99				
RIAU	1.11	1.32				
JAMBI	1.17	1.18				
SUMATERA SELATAN			2.14	2.26		
BENGKULU			2.01	2.51		
LAMPUNG	1.99			2.11		
KEP. BANGKA BELITUNG	0.57	0.77				
KEP. RIAU	0.9	1.21				
DKI JAKARTA	0.4	0.67				
JAWA BARAT	1.06	1.28				
JAWA TENGAH	1.43	1.84				
DI YOGYAKARTA	1.54		2.08			
JAWA TIMUR	1.61	1.97				
BANTEN	0.8	1.14				
BALI	0.5	0.61				
NUSA TENGGARA BARAT			2.12	2.74		
NUSA TENGGARA TIMUR					4.13	4.16
KALIMANTAN BARAT	1.02	1.13				
KALIMANTAN TENGAH	0.76	0.88				
KALIMANTAN SELATAN	0.66	0.77				
KALIMANTAN TIMUR	0.99	1.03				
KALIMANTAN UTARA	1.12	0.86				
SULAWESI UTARA	0.89	1.23				
SULAWESI TENGAH			3.19	2.78		
SULAWESI SELATAN	1.63	1.65				
SULAWESI TENGGARA			2.23	2.23		
GORONTALO			2.61	2.86		
SULAWESI BARAT	1.44	1.95				
MALUKU			3.74	3.76		
MALUKU UTARA	1.08	1.09				
PAPUA BARAT					5.64	6.07
PAPUA					6.07	6.9

Sumber: BPS, 2020.

3.3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Data tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi berbeda-beda. Provinsi Bali memiliki indeks keparahan kemiskinan (P2) terkecil 0,1 persen disusul Provinsi Papua 1,98 persen sebagai nilai tertinggi. Indeks keparahan kemiskinan (P2) dikelompokkan menjadi tiga (rendah, sedang dan berat). Pengelompokan Indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0-2 persen kategori ringan, 2,01-4 persen kategori sedang, 4,01-6 persen kategori berat. Data tahun 2019 seluruh Provinsi pada kelompok indeks keparahan kemiskinan ringan (0-2 persen).

Data indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun 2020 berubah. Indeks keparahan (P2) seluruh Provinsi meningkat. Peningkatan indeks keparahan (P2) berkisar antara 0,1 persen hingga 0,51 persen. Sebelum terjadi Pandemic Covid 19 Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan wilayah dengan nilai P2 yang tinggi dikarenakan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dengan nilai tambah yang rendah. Setelah terjadi Pandemic Covid 19 kondisi penduduk semakin parah ketika terkena Covid 19 penduduk tidak dapat bekerja sehingga pendapatan yang

tadinya sedikit saat terkena Covid 19 penduduk menjadi kehilangan pendapatan dan menjadi cenderung miskin.

Tabel 5. Data Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia
Tahun 2019-2020

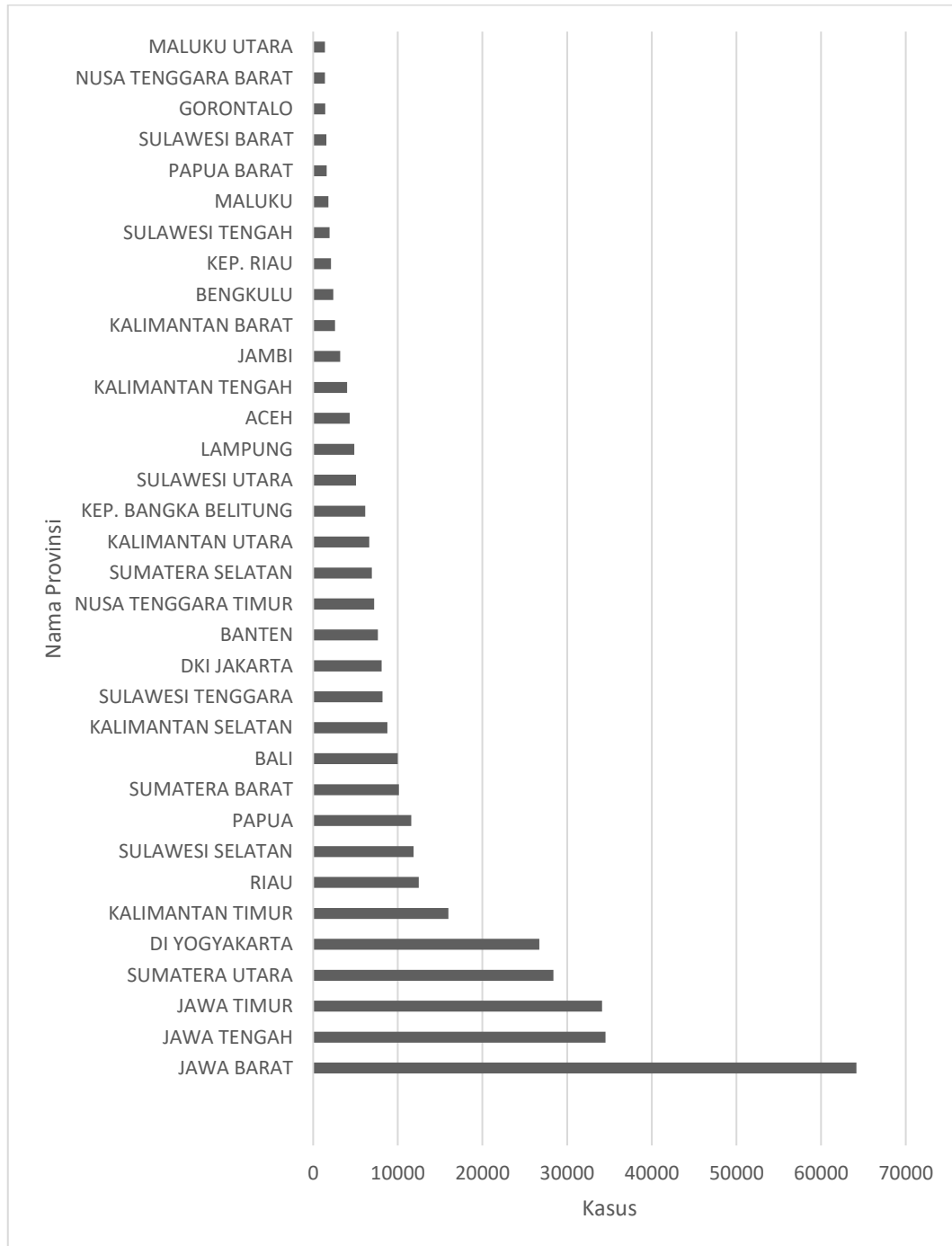
Nama Provinsi	(P2) Ringan (0-2) Persen		(P2) Sedang (2,01-4) Persen		(P2) Berat (4,01-6) Persen	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
ACEH	0.67	0.83				
SUMATERA UTARA	0.37	0.45				
SUMATERA BARAT	0.15	0.26				
RIAU	0.25	0.43				
JAMBI	0.26	0.27				
SUMATERA SELATAN	0.52	0.63				
BENGKULU	0.45	0.64				
LAMPUNG	0.44	0.57				
KEP. BANGKA BELITUNG	0.12	0.17				
KEP. RIAU	0.18	0.42				
DKI JAKARTA	0.07	0.15				
JAWA BARAT	0.24	0.29				
JAWA TENGAH	0.28	0.43				
DI YOGYAKARTA	0.3	0.5				
JAWA TIMUR	0.37	0.53				
BANTEN	0.23	0.34				
BALI	0.1	0.12				
NUSA TENGGARA BARAT	0.52	0.73				
NUSA TENGGARA TIMUR	1.12	1.24				
KALIMANTAN BARAT	0.22	0.31				
KALIMANTAN TENGAH	0.17	0.22				
KALIMANTAN SELATAN	0.16	0.18				
KALIMANTAN TIMUR	0.24	0.29				
KALIMANTAN UTARA	0.27	0.19				
SULAWESI UTARA	0.17	0.3				
SULAWESI TENGAH	1.15	0.87				
SULAWESI SELATAN	0.43	0.46				
SULAWESI TENGGARA	0.59	0.67				
GORONTALO	0.56	0.79				
SULAWESI BARAT	0.29	0.55				
MALUKU	1.11	1.18				
MALUKU UTARA	0.3	0.23				
PAPUA BARAT	1.9			2.41		
PAPUA	1.98			2.35		

Sumber: BPS, 2020.

3.4. Perkembangan Kasus Covid 19

Kasus penularan corona virus (Covid 19) di Indonesia dimulai pada Maret 2020 dan terus berlangsung. Satuan tugas penanganan Covid 19 memberikan data kasus corona virus (Covid 19) hingga awal tahun (Januari) 2021 menunjukkan penyebaran kasus Covid 19 tertinggi berasal dari Pulau Jawa. Zahrani & Pramana, (2021) menemukan bahwa tingginya penyebaran kasus Covid 19 di Pulau Jawa disebabkan oleh pelonggaran kegiatan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) menjadi PSBB transisi yang memungkinkan sarana dan prasarana umum kembali beroperasi. Keadaan ini menjadi pemicu munculnya kasus Covid

tertinggi dari Provinsi Jawa Barat dengan 64.154 kasus. Kasus corona virus (Covid 19) tertingi kedua berasal dari Provinsi Jawa Tengah terdapat 34.519 kasus. Provinsi Jawa Timur memiliki 34.123 kasus dan menempati urutan kasus tertinggi ketiga. Provinsi Sumatera Utara (urutan tertinggi keempat) 28. 392 kasus. DI. Yogyakarta terdapat 26.708 kasus menempati urutan tertinggi kelima di Indonesia.



Gambar 4. Kasus Covid 19 di Indonesia
Sumber: (Satuan Tugas Penanganan Covid 19) 2020

Kasus corona virus (Covid 19) tertinggi pertama hingga ketiga berada Pulau Jawa terdiri dari Provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi DI Yogyakarta merupakan Provinsi dengan kasus corona virus (Covid 19) tertinggi di urutan keempat. Pulau Sumatera kasus corona virus (Covid 19) tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara. Penduduk di

Pulau Jawa banyak yang terpapar corona virus (Covid 19). Hal mengakibatkan banyak penduduk yang membutuhkan fasilitas kesehatan berupa: obat-obatan, pelayanan dari tim medis hingga ruangan untuk melakukan isolasi. Penularan corona virus (Covid 19) di Pulau Jawa berpengaruh terhadap ekonomi. Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Indonesia.

Lima provinsi dengan kasus corona virus (Covid 19) tertinggi di Indonesia selanjutnya dikaitkan dengan kondisi kemiskinan. Provinsi dengan PDRB yang tinggi memiliki jumlah penduduk yang besar. Tingginya jumlah penduduk memperbesar peluang penyebaran virus Covid 19. Penularan virus Covid 19 membuat penduduk harus mengisolasi diri (tidak melakukan kegiatan di luar rumah). Penduduk terpapar Covid 19 mengalami penurunan produktivitas dan berpotensi untuk menyebarkan virus kepada penduduk yang sehat. Hal ini menjadi penyebab Provinsi PDRB dan penduduk padat memiliki angka penularan Covid 19 yang tinggi.

Pertama Provinsi Jawa Barat memiliki kasus corona virus (Covid 19) terbesar pertama di Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan perubahan kemiskinan. Peningkatan persentase penduduk miskin (P0) di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,61 persen. Nilai indeks kedalaman (P1) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 meningkat 0,21 persen dibandingkan tahun 2019. Peningkatan sebesar 0,05 persen ditemukan pada indeks keparahan (P2) di Provinsi Jawa Barat. Pandemi covid 19 tinggi di Provinsi Jawa Barat secara bersamaan juga peningkatan kemiskinan.

Peringkat kedua tertinggi kasus corona virus (Covid 19) ditemukan pada Provinsi Jawa Tengah. Kondisi pandemi covid 19 bersamaan dengan terjadinya perubahan kemiskinan. Hasil pengukuran kemiskinan menunjukkan peningkatan nilai dari masing-masing indikator diantaranya: peningkatan persentase penduduk miskin (P0) sebesar 1,26 persen. Peningkatan Indeks kedalaman (P1) meningkat 0,41 persen dan indeks keparahan kemiskinan (P2) meningkat sebesar 0,15 persen. Jumlah kasus corona virus (Covid 19) yang tinggi diwaktu bersamaan dengan terjadinya peningkatan kemiskinan.

Posisi ketiga Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi dengan kasus corona virus (Covid 19) yang tinggi. Kondisi ini secara bersamaan dengan terjadinya peningkatan kemiskinan. Kemiskinan dengan peningkatan persentase penduduk miskin (P0) 1,26 persen, peningkatan 0,36 persen indeks kedalaman (P1) dan 0,16 persen indeks keparahan kemiskinan (P2). Kasus corona virus (Covid 19) yang meningkat tahun 2020 dalam waktu yang sama juga terjadi peningkatan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Keempat Provinsi Sumatera Utara sebagai satu-satunya Provinsi di Luar Pulau Jawa dengan kasus positif corona virus (Covid 19) dan masuk peringkat lima besar nasional. Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan keempat tertinggi nasional. Pandemi Covid 19 meningkat seiring dengan peningkatan kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya persentase penduduk miskin (P0) sebesar 0,51 persen, bertambahnya indeks kedalaman (P1) 0,12 dan nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) meningkat 0,08 persen. Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah kasus corona virus dan kemiskinan yang tinggi pada tahun 2020.

Kelima Provinsi DI. Yogyakarta merupakan Provinsi kelima tertinggi ditemukannya corona virus (Covid 19) di Indonesia. Provinsi DI. Yogyakarta mengalami penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan menurunnya kinerja sektor pariwisata dan perhotelan. Provinsi DI, Yogyakarta diwaktu bersamaan mengalami pandemi Covid 19 dan

peningkatan kemiskinan tahun 2020. Data persentase penduduk miskin (P0) meningkat 1,38 persen, data indeks kedalaman (P1) bertambah 0,54 persen dan indeks keparahan kemiskinan (P2) juga meningkat 0,2 persen pada tahun 2020.

Hasil analisis menunjukkan kondisi pandemic covid 19 dan kemiskinan pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Terjadi perubahan (peningkatan) kemiskinan tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020. Kemiskinan yang meningkat dilihat dari perolehan nilai persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Pandemic Covid 19 berhasil mempengaruhi ekonomi. Pendapatan penduduk menurun atau bahkan hilang dimana, banyak penduduk tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehingga menjadi miskin (Hanoatubun, 2020). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahmawati et al., (2021), Setyadi & Indriyani, (2021) Suryahadi et al., (2020) dan (Khoirudin, 2021).

4. PENUTUP

Pandemic covid 19 dan kemiskinan dalam kurun waktu yang sama (2019-2020) mengalami peningkatan. Analisis kemiskinan (P0, P1 dan P2) mengalami peningkatan berdasarkan perbandingan data tahun 2019 dan 2020. Sementara jumlah kasus covid 19 di Indonesia juga bertambah. Ditemukan lima Provinsi dengan kasus virus corona (Covid 19) tinggi diantaranya: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan DI. Yogyakarta. Lima Provinsi dengan kasus virus corona (Covid 19) tinggi juga mengalami peningkatan pada persentase penduduk kemiskinan (P0), indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan (P2). Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah untuk tetap fokus pada program penanggulangan pandemic Covid 19 khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan DI. Yogyakarta. Novelty dari penelitian ini menemukan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan DI. Yogyakarta sebagai Provinsi dengan PDRB yang tinggi dengan persebaran Covid 19 yang besar. Hal ini dikarenakan kelima Provinsi tersebut merupakan pusat ekonomi dengan jumlah yang padat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku / Dokumen Publikasi Resmi:

- Aisah, R. N., Wibowo, A. S., Astuti, A., & Suherman. (2020). *Kota Cilegon*. 13(2), 315-328.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika*. Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. (2015.a) Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai 11, 22 Persen diakses 29 Agustus 2022 dari, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2015/09/15/1158/persentase-penduduk-miskin-maret-2015-mencapai-11-22-persen.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2017.b) Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 Persen diakses 29 Agustus 2022 dari, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019.c) Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019 diakses 30 Juli 2022 dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020.d) Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

- Tahun 2020 diakses 30 Juli 2022 dari [https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-
penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-
persen.html](https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html)
- Badan Pusat Statistik. (2019.e) Indeks Kedalaman (P1) Indonesia Tahun 2019 diakses 30 Juli 2022 dari [https://www.bps.go.id/indicator/23/503/1/indeks-kedalaman-
kemiskinan-p1-menurut-provinsi.html](https://www.bps.go.id/indicator/23/503/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-provinsi.html)
- Badan Pusat Statistik. (2020.f) Indeks Kedalaman (P1) Indonesia Tahun 2020 diakses 30 Juli 2022 dari [https://www.bps.go.id/indicator/23/503/1/indeks-kedalaman-
kemiskinan-p1-menurut-provinsi.html](https://www.bps.go.id/indicator/23/503/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-provinsi.html)
- Badan Pusat Statistik. (2019.g) Indeks Keparahan (P2) Indonesia Tahun 2019 diakses 30 Juli 2022 dari [https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan-
kemiskinan-p2-menurut-provinsi.html](https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-provinsi.html)
- Badan Pusat Statistik. (2020.h) Indeks Keparahan (P2) Indonesia Tahun 2020 diakses 30 Juli 2022 dari [https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan-
kemiskinan-p2-menurut-provinsi.html](https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-provinsi.html)
- Badan Pusat Statistik. (2020.i) Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 diakses 29 Agustus 2022 dari [https://www.bps.go.id/indicator/12/2131/1/jumlah-penduduk-
hasil-sp2020-menurut-wilayah-dan-jenis-kelamin.html](https://www.bps.go.id/indicator/12/2131/1/jumlah-penduduk-hasil-sp2020-menurut-wilayah-dan-jenis-kelamin.html)
- Badan Pusat Statistik. (2020.j) Jumlah Layanan Kesehatan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 diakses 29 Agustus 2022 dari [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/a
pi_pub/biszcFRCUnVKUXNnTDZvWnA3ZWtyUT09/da_04/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/biszcFRCUnVKUXNnTDZvWnA3ZWtyUT09/da_04/1)
- Badan Pusat Statistik. (2020.k) Jumlah Tenaga Medis Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 diakses 29 Agustus 2022 dari [https://www.bps.go.id/indicator/30/1477/1/kepadatan-dan-
distribusi-tenaga-kesehatan.html](https://www.bps.go.id/indicator/30/1477/1/kepadatan-dan-distribusi-tenaga-kesehatan.html)
- Sachs, J. D. (2015). *The end of poverty: Economic possibilities for our time*. Penguin.
- Sanz, R., Peris, J. A., & Escámez, J. (2017). Higher education in the fight against poverty from the capabilities approach: The case of Spain. *Journal of Innovation & Knowledge*.
- Jurnal :**
- Alkire, S., & Santos, M. E. (2014). Measuring Acute Poverty in the Developing World: Robustness and Scope of the Multidimensional Poverty Index. *World Development*, 59, 251–274. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026>
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Goma, E. I. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan di Indonesia. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 33–42. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3180>
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Itang, I. (2017). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01), 1-30.
- Khoirudin, A. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. *Iqtishaduna*, 4(1), 532–541. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v6i1.426>

- Purwono, R., Wisnu, W., Haryanto, T., & Mubin, M. K. (2021). Poverty dynamics in Indonesia: empirical evidence from three main approaches. *World Development Perspectives*, 23, 100346. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346>
- Rahmawati, A., Lutfiani, L., Yunia, Z. R., Rofiqoh, I., Zahrok, F. F., & Wahyuningtyas, D. (2021). Dampak Pandemic Covid- 19 Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan. *Efektor*, 8(1), 79–88. <https://doi.org/10.29407/e.v8i1.15708>
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2017). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 17–33. <https://doi.org/10.20473/jiet.v1i2.3252>
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Anak. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4, 1–11. <https://spektrumonline.com/2020/11/11/dampak-pandemi-covid-19-multidimensi/>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 0(0), 1–34. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Zahrani, C. I., & Pramana, S. (2021). Analisis Perkembangan Kasus COVID-19 Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah di Pulau Jawa. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 9(1), 01–12. <https://doi.org/10.47007/inohim.v9i1.224>
- Sumber Referensi Lainnya :**
- Yip Britt and Valeria Perasso. 2021. Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini? : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872#:~:text=Virus%20SARS%2DCoV%2D2%20pertama,pertama%20infeksi%20Covid%2D19%20tercatat>. Diakses tanggal 7 Agustus 2022